

PENGARUH FAKTOR DETERMINAN DALAM KUALITAS LAPORAN KEUANGAN OPD DI KOTA PALEMBANG

Eka Jumarni Fithri¹⁾, Susi Ardiani²⁾, M. Husni Mubarak³⁾

^{1,2,3}Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

email: ekajf.2f@polsri.ac.id, hu5ni_mubarak@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good governance*, komitmen organisasi perangkat daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di Kota Palembang. Populasi dalam penelitian ini 30 Organisasi Pemerintah Daerah yang ada di Kota Palembang dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, data yang dikumpul diolah dengan software SPSS versi 18. Hasil penelitian dengan regresi berganda menunjukkan *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di Kota Palembang. Komitmen organisasi perangkat daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di Kota Palembang. Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di Kota Palembang. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di Kota Palembang. Peran auditor internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di Kota Palembang. *Good governance*, komitmen organisasi perangkat daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran auditor internal berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di Kota Palembang.

Kata Kunci : *Good governance*, Komitmen organisasi perangkat daerah, Kompetensi sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi

Abstract

This research aimed to examine the impact of the good governance, commitment of regional apparatus organizations, human resources competence, utilization of information technology, and the role of internal auditors on the quality of financial reports of regional apparatus organizations in Palembang City. The population in this research was 30 local government organizations in Palembang City. The data collection techniques used in this research were primary data obtained through distributing questionnaires, the data collected was processed with SPSS version 18 software. The results of the research with multiple linear regression showed that good governance of regional apparatus organizations partially has an influence on the quality of financial reports of regional apparatus organizations in Palembang City. Commitment of regional apparatus organizations partially has an influence on the quality of financial reports of regional apparatus organizations in Palembang City. Human Resources Competence has an influence on the quality of regional organizational financial statements in Palembang. The use of information technology has an influence on the quality of financial statements of regional government organizations in Palembang. The role of the Internal Auditor has an influence on the quality of financial reports of regional apparatus organizations in Palembang City. Regional organizational commitment, human resources competency, utilization of information technology, and the role of internal auditors jointly affect the quality of regional organizational financial statements in Palembang City.

Key Words : *Good Governance, Commitment of Regional Apparatus Organizations, Resource Competence Human, Utilization of Information Technology*

1. PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kinerja yang baik dipusat dan daerah dalam rangka mewujudkan cita-cita berbangsa bernegara. Dalam mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya perbaikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat berguna bagi para pengguna atau stakeholder, terutama transparansi kepada masyarakat. Praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pascagerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan keuangan yang berkualitas sudah menjadi hal penting sebagai pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara *transparansi dan akuntabilitas*.

Pertanggung jawaban pemerintah yang transparansi dan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik, baik di pusat maupun di daerah terhadap praktek Organisasi sektor publik di Indonesia merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang memadai, jika tidak didukung dengan teknologi informasi belum tentu dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Agar menunjang laporan keuangan andal, akuntabel, dan transparan maka diperlukan

suatu Teknologi Informasi untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan OPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang telah meraih lima kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga Pemerintah Kota Palembang tercepat kedua dalam mengumpulkan laporan keuangan (djp.kemenkeu.go.id). Hal ini dapat diartikan bahwa dari hasil data tersebut kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang sangat baik, transparan dan pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan negara telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pemerintah kota Palembang sudah meningkatkan laporan keuangannya sehingga berhasil meraih WTP.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti tentang Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Good Governance, Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang secara parsial dan simultan

2. TELAHAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pascagerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)

Menurut Zurnali (2010, 127) komitmen organisasi adalah sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi tau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga komponen yakni komitmen afektif, komitmen kontinyu, dan komitmen normatif. Komitmen organisasi merupakan nilai personal, yang kadang-kadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan/organisasi atau komitmen pada perusahaan itu (Hapsari, 2011). Sikap yang mewakili sejauh mana seorang karyawan mengidentifikasi dengan organisasinya dan keinginannya untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 (10) tentang Ketenagakerjaan, Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, Keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut Sedarmayanti (2018 : 226), Kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik, Sedangkan menurut Menurut Emron, (2017,P.140) kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap.

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (Undang-undang No.19 Tahun 2016). Teknologi yang digunakan dalam teknologi informasi adalah teknologi komputer, teknologi telekomunikasi dan teknologi yang mampu memberikan nilai tambah untuk suatu organisasi (Hastha Dewa Putranta, 2004 : 24).

Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang (Aji Supriyanto, 2005 : 243).

Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI), audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian resiko, pengendalian dan proses *governance*.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Tujuan laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pemakainya guna untuk pengambilan keputusan. Kualitas informasi LKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, serta sesuai dengan pedoman penyusunan LKPD

Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:96). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan". Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

H₂ : Terdapat pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

H₃ : Terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

H₄ : Terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

H₅ : Terdapat pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian adalah data primer yang termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian asosiatif kausal dengan metode kuantitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang yang berjumlah 30 Organisasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari 5 Badan, 23 Dinas, 1 Inspektorat, dan 1 Satuan. Data diambil di Februari 2021

Variabel Penelitian

Variabel Independen

Variabel X dalam penelitian ini terdapat 5(lima) variabel independen yang digunakan yaitu Good Governance (X1), Komitmen Organisasi Perangkat Daerah (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) dan Peran Auditor Internal (X5) yang merupakan bagian dari proses Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang (Y). Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner. Variabel ini diukur dengan skalah likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidak setujuannya terhadap pernyataan yang dilakukannya. Menurut Sugiyono (2012:93) skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu lima tingkatan dimulai dari satu sampai lima. Setiap Instrumen terdiri dari pernyataan dengan menggunakan instrumen

berskala *likert* lima poin, yaitu skala 1 (Tidak Diterapkan) sampai Skala 5 (Seluruhnya Diterapkan).

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Pemerintah Daerah yang ada di Kota Palembang yang berjumlah 30 Organisasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari 5 Badan, 23 Dinas, 1 Inspektorat, dan 1 Satuan. Populasi dalam penelitian ini dipusatkan pada pegawai masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah sebanyak 4 orang

Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 120 orang pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang., yang terdiri dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang, dan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) peneliti mengambil 4 orang responden yang terdiri dari Kepala Dinas/Badan, Kasubag Keuangan, Bendahara, dan pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden secara langsung. Penyebaran kuesioner ini dilakukan pada seluruh pegawai yang menjadi sampel di Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara mengolah data yang terkumpul kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menunjukkan masalah yang telah dirumuskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Untuk mempermudah analisis dan uji hipotesis yang diajukan, data yang dikumpul diolah dengan software SPSS versi 18

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah responden 120 orang, kuesioner yang kembali adalah sebanyak 94 dimana 4 kuesioner tidak dapat diolah karena tidak lengkap dan kuesioner yang tidak kembali 26 kuesioner dikarenakan ada beberapa responden yang keberatan untuk mengisi kuisisioner maupun responden yang sedang bertugas di luar kantor sehingga sulit untuk responden mengisi kuisisioner.

Hasil Uji Normalitas

Analisis statistik menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test* untuk menentukan normalitas distribusi residual jika *Asymp Sign (2-tailed)* > $\alpha (0,05)$, maka data distribusi normal.

Tabel 4.1

Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample *Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandarized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,169666
	Absolute	,086
Most Extreme Differences	Positive	,086
	Negative	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		,812
Asymp. Sig. (2-tailed)		,525
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai *asyp.sig (2-tailed)* residual dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,525. Dengan demikian model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Palembang dengan persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan Nilai konstanta bernilai 2,581, artinya menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu Komitmen OPD, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal nilainya 0 maka Kualitas Laporan Keuangan sebesar 2,581 atau 2,581 %.

Nilai koefisien regresi pada variabel Komitmen Organisasi Perangkat Daerah (b_1X_1) bernilai positif sebesar 0,350. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya peningkatan Komitmen Organisasi Perangkat Daerah sebesar 1% maka nilai Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,350% dengan asumsi variabel indenpenden lainnya bernilai tetap

Nilai koefisien regresi pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (b_2X_2) bernilai positif sebesar 0,233. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 1% maka nilai Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,233% dengan asumsi variabel indenpenden lainnya bernilai tetap.

Nilai koefisien regresi pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (b_3X_3) bernilai positif sebesar 0,409. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 1% maka nilai Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,409% dengan asumsi variabel indenpenden lainnya bernilai tetap

Nilai koefisien regresi pada variabel Peran Auditor Internal (b_4X_4) bernilai positif sebesar 0,348. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya peningkatan Peran Auditor Internal sebesar 1% maka nilai Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,348% dengan asumsi variabel indenpenden lainnya bernilai tetap

Nilai koefisien regresi pada variabel *Good Governance* (b_5X_5) bernilai positif sebesar 0,159. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya peningkatan Peran Auditor Internal sebesar 1% maka nilai Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,159% dengan asumsi variabel indenpenden lainnya bernilai tetap

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya nilai korelasi antara variabel independen (X) yang terdiri dari Komitmen Organisasi Perangkat Daerah (X_1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3), Peran Auditor Internal (X_4) dan *Good Governance* (X_5) terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 4.2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,785 ^a	,616	,597	2,220
a. Predictors: (Constant), Total Skor x5, Total Skor x4, Total Skor x1, Total Skor x3, Total Skor x2				
b. Dependent Variable: Total Skor Y				

Sumber : Data yang diolah, 2021

Hasil pengujian Koefisien determinasi dapat dilihat bahwa hasil pengujian regresi berganda diperoleh R sebesar 0,785 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara *Good Governance* (X_1), Komitmen Organisasi Perangkat Daerah (X_2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4), Peran Auditor Internal (X_5) dan mempunyai hubungan yang relative kuat sebesar 78,5%. Sedangkan nilai R Square atau nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,616. Hal ini berarti bahwa variabel X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 61,6% terhadap variabel Y. Sedangkan sisanya ($100\% - 61,6\% = 38,4\%$) disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,597 atau 59,7% ini menunjukkan besarnya sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian secara parsial (uji t) terhadap masing-masing variabel independen yaitu *Good Governance* (X_1), Komitmen Organisasi Perangkat Daerah (X_2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4), Peran Auditor Internal (X_5) dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah diajukan. Hasil

output regresi dengan SPSS akan menunjukkan nilai t_{hitung} dan signifikansinya.

Untuk melihat signifikansi setiap variabel, maka dapat dilakukan dengan melihat dari nilai t_{hitung} setiap variabel X. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika nilai sig. berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai t_{tabel} dicari pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$ atau $61 - 4 - 1 = 56$. Hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar $2,00324 / 2,003$. Penerimaan hipotesis juga dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap variabel independen. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% maka hipotesis dapat diterima. nilai t_{hitung} dan derajat signifikansi tiap variabel independen *Good Governance* (X_1), Komitmen OPD (X_2), Kompetensi SDM (X_3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4), Peran Auditor Internal (X_5) dan yang merupakan indikator penerimaan dan penolakan hipotesis. Hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji t).

Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

Variabel *Good Governance* Daerah (X_1) nilai t_{hitung} sebesar 3,101 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,003 dengan nilai signifikansi ($0,003 < 0,05$ sehingga H_{a2} diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel *Good Governance* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Sarifah (2018) Penerapan good government governance berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang

Variabel Komitmen Organisasi Perangkat (X_2) nilai t_{hitung} sebesar 2,247 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,003 dengan nilai signifikansi ($0,027 < 0,05$ sehingga H_{a2} diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen Organisasi Perangkat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang yang artinya walaupun institusi memiliki suatu kebijakan dan peraturan terkait kinerja, apabila semuanya dapat dijalankan dengan baik oleh pelaku organisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Maksyur

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) nilai t_{hitung} sebesar 2,295 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,003 dengan nilai signifikansi (0,024) < 0,05 sehingga H_{a3} diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Mariana Tampubolon (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4) nilai t_{hitung} sebesar 3,327 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,003 dengan nilai signifikansi (0,001) < 0,05 sehingga H_{a4} diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Mariana Tampubolon (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang

Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang

Variabel Peran Auditor Internal (X_5) nilai t_{hitung} sebesar 2,153 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,003 dengan nilai signifikansi (0,001) < 0,05 sehingga H_{a5} diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Peran Auditor Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Frasca Ardy (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaruh Good Governance, Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang

Berdasarkan hasil uji F dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel *Good Governance* (X_1), Komitmen Organisasi Perangkat Daerah (X_2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4), Peran Auditor Internal (X_5) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan maka nilai t_{hitung} dan derajat signifikansi < 0,05 maka tiap variabel independen *Good Governance*, Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang baik secara parsial maupun secara simultan

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aji Supriyanto. 2005. Pengantar Teknologi Informasi. Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti, Nanang Wijaya (2018) pengaruh penerapan good government governance (ggg) dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) terhadap kualitas pelaporan keuangan (studi kasus pemerintah daerah provinsi di jawa barat dan banten) *Bance vocation accounting jurnal*
- Edison Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Alfabeta, Bandung.
- Fitri Mariana Tampubolon, Ahmad Basid. 2019. pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta) . *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*
- Frasca Ardy. 2014. Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tegal
- Hapsari, Niken Nindya. 2011. Pengaruh Pengalaman Auditor dan Orientasi Etika terhadap Keputusan Etis Auditor Negara dengan Komitmen Profesional sebagai Variabel Intervening. *Jurnal EL-MUHASABA Akuntansi Fak. Ekonomi UIN Maliki Malang*
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Putranta, Hastha Dewa. 2004. Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi, Amus, Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2018. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Zurnali, Cut. 2010. Learning Organization, Competency, Organizational Commitment, And Customer Orientation: Knowledge Worker-Kerangka Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Masa Depan. Bandung: Unpad Press
- Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Citra Umbara, Bandung, 2016;
- UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 (10) tentang Ketenagakerjaan, Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, Keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi